

Richo Andi Wibowo

**TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
YANG BAIK**

D A N

**PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH**

Pendekatan Perbandingan Hukum



GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 <i>DISTRUST</i> DAN MALADMINISTRASI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP)	1
1.1 Ketidakpercayaan (<i>Distrust</i>) Pihak Pengawas kepada ASN yang Terlibat PBJP	3
1.2 Ketidakpercayaan (<i>Distrust</i>) ASN yang Terlibat PBJP kepada Pihak Pengawas	5
1.3 Ketakutan yang Berlebihan dan Indikasi Penyelewengan APH	12
1.4 Peran Hukum Administrasi dalam Mencegah Ketidakpercayaan (<i>Distrust</i>) dan Korupsi	17
1.5 Lima Permasalahan Fundamental dan Ikhtiar untuk Mengatasinya	20
BAB 2 SEJARAH, KONSEP, DAN ASAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	27
2.1 Sejarah dan Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	28
2.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagai Asas- Asas Hukum	43
BAB 3 SEJARAH, KONSEP, ASAS PBJP YANG BAIK	61
3.1 Sejarah dan Konsep PBJP	61

3.2	Konsep PBJP yang Baik	64
3.3	Asas-Asas PBJP yang Baik	65
3.4	Temuan Konseptual.....	77
BAB 4	TINJAUAN UMUM PBJP DI INDONESIA.....	81
4.1	Sejarah Singkat Regulasi PBJP	81
4.2	Tinjauan Umum Regulasi PBJP	83
4.3	Pejabat yang Terlibat dalam PBJP	84
4.4	Metode Pemilihan Penyedia PBJP	88
4.5	Tahapan Metode Pemilihan Pelelangan Umum (Kini Disebut Tender)	90
BAB 5	PELANGGARAN LIMA ASAS-ASAS PBJP YANG BAIK DI INDONESIA.....	97
5.1	Asas Kesempatan yang Sama: Masalah dan Pelanggaran.....	98
5.2	Asas Perlakuan yang Sama: Masalah dan Pelanggaran.....	103
5.3	Asas Transparansi: Masalah dan Pelanggaran	109
5.4	Asas Akuntabilitas (Kejelasan Forum Akuntabilitas Hukum): Masalah dan Pelanggaran	116
5.5	Asas Akuntabilitas (Pemulihan Hak-Hak Peserta Tender Secara Efektif oleh Peradilan): Masalah dan Pelanggaran.....	121
5.6	Kesimpulan	130
BAB 6	PERLINDUNGAN LIMA ASAS-ASAS PBJP YANG BAIK DI BELANDA.....	133
6.1	Asas Kesempatan yang Sama: Situasi dan Perlindungan Hukum.....	133
6.2	Asas Perlakuan yang Sama: Regulasi dan Perlindungan Hukum	139
6.3	Asas Transparansi: Regulasi dan Perlindungan Hukum.....	144
6.4	Asas Akuntabilitas (Kejelasan Forum Akuntabilitas Hukum): Regulasi dan Perlindungan Hukum	151

6.5	Asas Akuntabilitas (Pemulihan Hak-Hak Peserta Tender Secara Efektif oleh Peradilan): Regulasi dan Perlindungan Hukum	156
6.6	Kesimpulan	164
BAB 7	PERLINDUNGAN LIMA ASAS PBJP YANG BAIK DI INGGRIS	167
7.1	Asas Kesempatan yang Sama: Situasi dan Perlindungan Hukum.....	168
7.2	Asas Perlakuan yang Sama: Regulasi dan Perlindungan Hukum.....	177
7.3	Asas Transparansi: Regulasi dan Perlindungan Hukum.....	180
7.4	Asas Akuntabilitas (Kejelasan Forum Akuntabilitas Hukum): Regulasi dan Perlindungan Hukum	186
7.5	Asas Akuntabilitas (Pemulihan Hak-Hak Peserta Tender Secara Efektif oleh Peradilan): Regulasi dan Perlindungan Hukum	191
7.6	Kesimpulan	200
BAB 8	PEMBELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK.....	203
8.1	Pendekatan Asas-Asas PBJP yang Baik.....	204
8.2	Hasil Perbandingan Hukum	208
BAB 9	TINDAK LANJUT.....	229
9.1	Langkah yang Dapat Diambil oleh Legislatif	229
9.2	Langkah yang Dapat Diambil oleh Eksekutif	231
9.3	Langkah yang Dapat Diambil oleh Yudikatif	234
	DAFTAR PUSTAKA.....	237
	GLOSARIUM.....	268
	TENTANG PENULIS.....	270